



MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Nurul Citra Lestari^{1*}, Reffy Ananda Rizki², Suprihatin³, Dikriyah⁴, Nazwatul Padilah⁵, Nurjamilah⁶, Ilma⁷

¹⁻⁷Institut Nida El-Adabi, Bogor, Indonesia

*Correspondence: citrlstari@gmail.com

Abstract

This study aims to examine financial management in Islamic religious education through a library research method, utilizing various relevant sources such as books, journal articles, and previous research findings. A descriptive qualitative analysis was employed to explore the principles and implementation of effective financial management in Islamic educational institutions. The findings indicate that financial management in Islamic education should be based on Islamic values such as trustworthiness, transparency, accountability, justice, efficiency, and effectiveness, which serve as the foundation for a professional, accountable, and worship-oriented financial system. The financial management process includes planning, organizing, budget implementation, as well as supervision and evaluation, all of which aim to ensure the effective and efficient use of funds to improve the quality of education. Applying these principles enables educational institutions to establish sustainable financial governance, strengthen public trust, and support the comprehensive achievement of the vision and mission of Islamic education.

Keywords: Financial Management; Islamic Education; Transparency; Sharia Values

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji manajemen keuangan dalam pendidikan agama Islam melalui metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber dari berbagai literatur relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menelaah prinsip-prinsip serta implementasi manajemen keuangan yang efektif di lembaga pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen keuangan dalam pendidikan Islam perlu berlandaskan nilai-nilai Islami, seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, yang menjadi fondasi bagi sistem keuangan profesional, akuntabel, dan bernilai ibadah. Proses manajemen keuangan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan evaluasi, yang bertujuan memastikan penggunaan dana tepat sasaran, efisien, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan lembaga pendidikan menciptakan tata kelola keuangan berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung tercapainya visi serta misi pendidikan Islam secara menyeluruh.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan; Pendidikan Islam; Transparansi; Nilai-Nilai Syariah

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Lembaga pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah maupun nonformal seperti pesantren, bertanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk kepribadian Muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan Islam harus didukung oleh sistem manajemen yang profesional dan berkelanjutan, khususnya dalam aspek keuangan.

Manajemen keuangan merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan lembaga untuk membiayai operasional pendidikan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, memperbaiki infrastruktur, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam swasta, tantangan pengelolaan keuangan menjadi semakin kompleks karena keterbatasan sumber dana, ketergantungan pada iuran siswa dan donasi masyarakat, serta belum meratanya kapasitas pengelolaan keuangan yang profesional.

Selain aspek efisiensi, manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan Islam juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, serta penghindaran terhadap riba, gharar, dan maysir. Hal ini menuntut lembaga untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga pada kepatuhan nilai-nilai Islam yang menjadi basis operasionalnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan lembaga.

Namun, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan, yang berujung pada rendahnya kualitas pendidikan. Penelitian oleh Ridwan Tasa dkk. (t.t.) menegaskan bahwa manajemen keuangan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan

mutu pendidikan melalui alokasi dana yang tepat, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta penerapan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam swasta, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menawarkan solusi strategis yang berbasis nilai-nilai Islam. Diharapkan kajian ini dapat menjadi kontribusi dalam upaya penguatan tata kelola keuangan lembaga pendidikan Islam secara menyeluruh dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Literatur yang dikaji mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal terindeks, tesis dan disertasi, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan Islam. Pemilihan sumber literatur dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan kredibilitas, keterbaruan, dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Fokus kajian diarahkan pada manajemen keuangan dalam pendidikan agama Islam, khususnya prinsip, strategi, dan implementasinya dalam konteks lembaga pendidikan. Salah satu rujukan utama adalah pandangan James Danandjaja (1997) yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan Islam harus berlandaskan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan, selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan merangkum, mengklasifikasi, dan menafsirkan temuan dari berbagai sumber literatur. Data yang diperoleh tidak sekadar disajikan, tetapi juga diinterpretasikan untuk mengungkap pola, kecenderungan, dan relevansinya terhadap perbaikan sistem pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan Islam. Analisis ini bertujuan

menghasilkan sintesis pengetahuan yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan praktik manajemen keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai prinsip syariah.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan teori yang ada, tetapi juga mengkonstruksi pemahaman baru berdasarkan integrasi temuan-temuan literatur, sehingga menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada landasan ilmiah dan nilai-nilai Islam.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen Keuangan dalam Pendidikan Agama Islam

Ahmad & Husain (2020) menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Transparansi memberikan ruang bagi semua pemangku kepentingan, baik itu guru, orang tua, pengelola yayasan, maupun masyarakat, untuk mengetahui secara jelas bagaimana dana dikelola, dari sumber hingga penggunaannya. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan terkait keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan spiritual.

Tujuan dari pengelolaan keuangan yang baik bukan semata-mata administratif, tetapi juga strategis. Setiap rupiah yang dikelola harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan, misalnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan fasilitas, maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip ini diperkuat dengan komitmen terhadap nilai-nilai syariah, seperti amanah, kejujuran, efisiensi, keadilan, dan keberkahan penggunaan dana.

Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selaras dengan ajaran Islam, lembaga pendidikan dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya profesional, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak. Berikut ini akan dibahas setiap prinsip manajemen keuangan tersebut, yaitu: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses keuangan, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Setiap transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus dicatat secara lengkap dan terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yayasan, orang tua murid, donatur, dan lembaga pengawas. Transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan merupakan elemen fundamental untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi institusi di mata masyarakat. Keterbukaan informasi keuangan menunjukkan bahwa lembaga bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam mengelola dana yang diterima, baik dari peserta didik, orang tua, maupun sumber eksternal lainnya. Salah satu bentuk nyata dari transparansi ini adalah penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara rutin yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti komite sekolah, orang tua siswa, dan donatur. Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi lembaga, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2016) mendukung hal ini dengan menegaskan bahwa transparansi keuangan sangat penting untuk meningkatkan dukungan dari orang tua. Dengan adanya informasi yang terbuka mengenai penggunaan dana, orang tua cenderung merasa lebih percaya dan terdorong untuk berkontribusi aktif terhadap keberlangsungan program-program pendidikan. Maka dari itu, transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan lembaga pendidikan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah merupakan suatu prinsip penting yang menekankan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dana pendidikan. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan keuangan yang diambil dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif, maupun hukum. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab kolektif

antara kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam pengelolaan anggaran sekolah.

Pelaksanaan akuntabilitas mengharuskan bahwa setiap penggunaan dana harus selaras dengan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, serta disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan sekolah. Setiap transaksi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, harus dicatat secara transparan dan dapat ditelusuri jejaknya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan audit atau pemeriksaan sewaktu-waktu.

Lebih dari itu, akuntabilitas juga mencakup kewajiban moral untuk bersikap jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam mengelola dana sekolah. Kepala sekolah dan bendahara, misalnya, harus mampu memberikan laporan yang jelas, rinci, dan dapat dimengerti oleh seluruh stakeholder, termasuk orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan instansi pemerintah terkait. Kejelasan dalam laporan keuangan ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Dengan menerapkan akuntabilitas secara konsisten, keuangan sekolah tidak hanya menjadi lebih tertib dan efisien, tetapi juga dapat mendorong terciptanya budaya transparansi, kepercayaan publik, dan peningkatan mutu layanan pendidikan di lingkungan sekolah.

Efisiensi

Efisiensi dalam manajemen keuangan sekolah mengacu pada kemampuan untuk menggunakan dana secara hemat dan bijaksana tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Prinsip efisiensi ini menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang fokus pada kebutuhan esensial, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam praktiknya, efisiensi berarti menyusun prioritas penggunaan dana secara cermat agar tidak terjadi pemborosan dan seluruh program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. Sekolah yang mampu menerapkan efisiensi secara optimal akan dapat menjalankan lebih banyak program pendidikan

meskipun dengan anggaran yang terbatas. Dengan demikian, efisiensi membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pendidikan dan ketersediaan sumber daya, serta memperkuat keberlanjutan program-program sekolah secara keseluruhan.

Efektivitas

Efektivitas dalam manajemen keuangan sekolah berkaitan dengan sejauh mana penggunaan dana dapat memberikan hasil nyata dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pengelolaan dana yang efektif memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan, seperti peningkatan mutu proses belajar mengajar, prestasi siswa, serta tercapainya indikator-indikator keberhasilan sekolah. Dengan menerapkan prinsip efektivitas, sekolah dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat maksimal dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang efektif berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Keadilan

Menurut Hidayat dkk. (2023), prinsip keadilan atau equilibrium menekankan pentingnya terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran. Dalam konteks manajemen keuangan, khususnya di lingkungan pendidikan atau lembaga publik, prinsip ini mengharuskan agar alokasi dana tidak hanya berpihak pada satu kelompok tertentu, tetapi mencerminkan kebutuhan seluruh elemen masyarakat secara menyeluruh. Penganggaran yang adil berarti mempertimbangkan berbagai kepentingan, kondisi sosial, serta prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pengalokasian dana harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan berdasarkan pertimbangan objektif agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat memicu kecemburuan sosial atau ketidakpuasan. Dalam praktiknya, prinsip

keadilan ini menjadi pedoman penting agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, serta memastikan bahwa manfaat dari penggunaan anggaran tersebut benar-benar merata dan berkelanjutan.

Langkah-Langkah Manajemen Keuangan dalam Pendidikan Agama Islam

Perencanaan Keuangan

Menurut Moh. Aripudin dkk. (2021), perencanaan merupakan keseluruhan proses berpikir dan penentuan secara matang terhadap apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Ia tidak hanya mencakup penentuan tujuan, tetapi juga strategi dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Dalam konteks manajemen, perencanaan menjadi fungsi utama dan pertama karena menjadi fondasi bagi pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Tanpa perencanaan yang matang, aktivitas lembaga berisiko berjalan tanpa arah, tidak efisien, bahkan dapat menimbulkan pemborosan sumber daya.

Dalam konteks pendidikan Islam, perencanaan memiliki dimensi tambahan, yakni keharusan untuk menyesuaikan setiap rencana dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa sumber-sumber dana yang akan dimasukkan dalam perencanaan keuangan harus berasal dari sumber yang halal, bersih, dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau haram. Dana tersebut bisa bersumber dari iuran peserta didik, sumbangan orang tua, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hingga kerja sama dengan lembaga lain yang sejalan secara nilai dan tujuan.

Perencanaan yang baik dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada target operasional, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan sosial. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan secara rasional, sistematis, dan objektif, serta disusun berdasarkan analisis kebutuhan riil lembaga. Dengan cara ini, lembaga pendidikan Islam dapat menyusun skala prioritas secara tepat, memanfaatkan dana secara efisien, serta menjamin bahwa seluruh proses pendidikan berlangsung secara berkelanjutan dan berkah.

Pengorganisasian Keuangan

Setelah proses perencanaan selesai, tahapan penting yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses yang sangat krusial dalam manajemen karena di sinilah langkah-langkah konkret mulai dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dadang Husen Sobana, pengorganisasian menuntut perlunya merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut. Dengan kata lain, pengorganisasian tidak hanya sekadar menyusun struktur, tetapi juga mencakup penetapan langkah-langkah operasional yang dapat diterapkan secara nyata.

Secara umum, pengorganisasian melibatkan proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik, yang kemudian dibagikan kepada individu atau pihak yang sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, pengorganisasian juga mencakup pengalokasian sumber daya secara efisien dan koordinasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan sinergis dan efektif, demi tercapainya tujuan organisasi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan, pengorganisasian berarti menyusun struktur organisasi keuangan yang jelas, terarah, dan efisien. Ini mencakup pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, seperti kepala sekolah, bendahara, tim pengawas keuangan, hingga yayasan jika ada. Dengan struktur yang terorganisasi dengan baik, pengelolaan keuangan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mendukung keberlanjutan program pendidikan.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap krusial dalam siklus manajemen keuangan, karena di sinilah anggaran yang sebelumnya direncanakan secara teoritis diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata berupa pengeluaran dan penerimaan. Keberhasilan pelaksanaan anggaran sangat menentukan efektivitas dan efisiensi program-program yang telah dirancang. Tanpa pelaksanaan yang disiplin dan tepat

sasaran, anggaran yang telah disusun secara cermat pun tidak akan memberikan dampak yang optimal.

Menurut Ramdhani & Anisa (2017), pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran. Artinya, jika proses pelaksanaan dilakukan dengan baik—mulai dari pencairan dana, distribusi ke setiap pos, hingga pemanfaatannya—maka kemungkinan besar target realisasi anggaran juga akan tercapai secara optimal. Sebaliknya, pelaksanaan yang tidak tertib dan tidak terarah dapat menyebabkan deviasi atau bahkan pemborosan anggaran. Dengan kata lain, persepsi positif terhadap pelaksanaan anggaran akan berbanding lurus dengan persepsi terhadap keberhasilan realisasi anggaran.

Dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran memerlukan kedisiplinan tinggi dari semua pihak yang terlibat. Dana harus digunakan sesuai dengan pos-pos yang telah ditetapkan, dan setiap pengeluaran yang berada di luar rencana harus melalui prosedur revisi anggaran yang sah dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Prinsip efisiensi dan transparansi harus menjadi pedoman utama dalam penggunaan dana, agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan perlu dilakukan secara tertib, sistematis, dan akuntabel, sehingga setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri dengan mudah ketika dilakukan audit atau evaluasi.

Dengan pelaksanaan anggaran yang baik, lembaga pendidikan tidak hanya dapat mencapai target keuangan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dari stakeholder, seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan dan kredibilitas institusi pendidikan tersebut.

Pengawasan dan Evaluasi

Penganggaran pendidikan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari proses evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan merupakan entitas yang terus berkembang, baik dari segi kebutuhan, tantangan, maupun arah kebijakan. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. Dalam praktiknya, manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu mengacu pada sejumlah prinsip penting,

antara lain: hemat dan tidak berlebihan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, anggaran juga harus dirancang secara terarah dan terkendali, sejalan dengan rencana kerja, program, dan kegiatan lembaga pendidikan. Prinsip transparansi pun menjadi krusial dalam manajemen anggaran, mengingat pentingnya keterbukaan akademik sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Lailatul Azizah (2023)

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tersebut, evaluasi tidak hanya terbatas pada penilaian terhadap efektivitas program, tetapi juga mencakup aspek pengawasan terhadap penggunaan dana dan sumber daya yang telah dialokasikan. Pengawasan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana program pembangunan pendidikan berjalan serta sejauh mana pencapaian target yang telah direncanakan.

Kelebihan dari adanya proses monitoring dan evaluasi yang rutin adalah kemampuannya dalam menghasilkan informasi yang akurat mengenai kemajuan suatu program. Dari situ, pihak manajemen dapat mendeteksi adanya penyelewengan, ketidaksesuaian antara target dan realisasi, maupun hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Selain itu, evaluasi juga dapat berfungsi sebagai alat refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Informasi yang diperoleh menjadi bahan umpan balik yang sangat berharga bagi penyempurnaan program dan kebijakan yang sedang berjalan.

Secara khusus dalam konteks lembaga pendidikan Islam, evaluasi dilakukan secara berkala tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi musyawarah. Hasil evaluasi biasanya dibahas dalam rapat tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pimpinan lembaga, guru, tenaga kependidikan, hingga komite sekolah. Melalui forum ini, semua pihak dapat menyampaikan masukan, kritik yang membangun, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Dengan demikian, proses

evaluasi tidak hanya menjadi instrumen teknis pengawasan anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokratisasi dan penguatan tata kelola lembaga pendidikan yang partisipatif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Manajemen keuangan dalam pendidikan agama Islam memiliki peran vital dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan menjadi landasan penting untuk mengelola dana secara profesional sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariah. Transparansi membangun kepercayaan publik, akuntabilitas menjamin tanggung jawab moral dan administratif, efisiensi mendorong penggunaan dana secara hemat dan tepat, efektivitas memastikan hasil nyata dari setiap pengeluaran, serta keadilan menjamin distribusi dana yang merata dan adil.

Langkah-langkah manajemen keuangan meliputi perencanaan yang matang dan sesuai syariah, pengorganisasian yang jelas dan sistematis, pelaksanaan anggaran yang disiplin dan tepat sasaran, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan dan partisipatif. Semua tahapan ini tidak hanya berorientasi pada pengelolaan dana secara administratif, tetapi juga membawa nilai-nilai ibadah, amanah, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, manajemen keuangan yang baik akan menjadi fondasi kokoh bagi tercapainya visi pendidikan Islam yang unggul, berkelanjutan, dan bernilai spiritual tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., Alam, M., Syarief Halim, A., & Agustian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, S. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pasca Covid-19. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta>
- James Danandjaja. (1997). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Vol. 52). Antropologi Indonesia.
- Lailatul Azizah. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Infaq (di Tpq Al-Khuriyah Bangil -Pasuruan). *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2), 125-145. <https://doi.org/10.29080/jai.v8i2.1073>
- Moh. Aripudin, Fathma Zahara Sholeha, & Lilis Fikriya Umami. (2021). Planning (Perencanaan) dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 146-160.
- Rahmah, N. (2016). *Journal of Islamic Education Management Oktober* (Vol. 1, Nomor 1).
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134-147. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Ridwan Tasa, M., Sultan, U., Muhammad, A., & Samarinda, I. (t.t.). *Manajemen Keuangan Dan Kualitas Pendidikan Islam: Analisis Pada Lembaga Pendidikan Islam Swasta*.